



Cuti Natal & Tahun Baru Dihapus

JAKARTA—Pemerintah menghapus cuti bersama Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 sebagai antisipasi munculnya gelombang 3 Covid-19. Penolakan libur Nataru dinilai bakal menahan laju pergerakan ekonomi di DIY.

Heribang Jeff Kusuma & Supriy Prayogo
rdak@harianjogja.com

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan pergerakan warga menjelang akhir tahun guna mencegah terjadinya lonjakan penularan Covid-19. "Kebijakan tersebut semata-mata dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif pada libur akhir tahun," kata Muhadjir Effendy, Rabu (27/10). Menurut dia, pemerintah juga

▶ Pemerintah melarang ASN mengambil cuti pada momentum hari libur nasional.

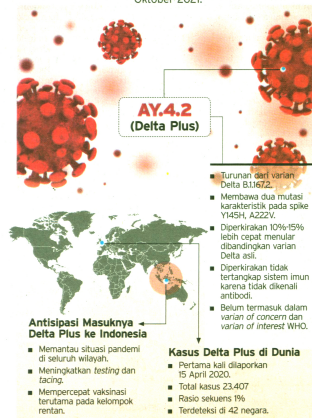
▶ Penolakan libur Nataru dinilai akan mempengaruhi pergerakan ekonomi di DIY.

melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dari atau cuti bagi ASN selama hari libur nasional 2021. "Kami berupaya menekan sedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama, kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kami lakukan," kata Muhadjir.

▶ Halaman 10

MEWASPADAI VARIAN DELTA PLUS

Pemerintah terus memantau dan mewaspadaai virus Corona varian baru AY.4.2 (Delta Plus) yang memiliki potensi penularan sangat cepat. Turunan dari varian Delta ini menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 di Inggris pada Oktober 2021.



Cuti Natal...

Muhadjir mengatakan warga yang harus menempuh perjalanan wajib memenuhi persyaratan perjalanan dan menjalani pemeriksaan ketat. Persyaratan itu seperti sudah vaksin serta membawa surat keterangan negatif tes *polymerase chain reaction* (PCR) untuk pengguna sarana transportasi udara, dan tes antigen untuk pengguna sarana transportasi darat dan laut. "Kemungkinan besar akan kami atur secara ketat seperti tahun lalu, ini demi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia," katanya.

Ia mengatakan pemerintah berusaha membatasi pergerakan warga guna mencegah terjadinya gelombang ketiga penularan Covid-19 seperti di negara lain.

Muhadjir berharap upaya mencegah gelombang ketiga tidak menghambat laju perekonomian serta aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Mantan Rektor UMM itu meminta kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memastikan daerah tujuan wisata lokal tetap berjalan serta kepada Kementerian Perdagangan agar pasokan bahan pokok tetap terjaga pada akhir tahun.

Peniadaan libur Nataru dinilai akan mempengaruhi pergerakan

ekonomi di DIY. Meski begitu alternatif lain masih bisa dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di sisa 2021 ini. "Pasti berpengaruh hitung-hitungan angka belum kami lakukan. Proyeksi kami kemarin masih sama untuk pertumbuhan ekonomi 2021 yaitu 5,2 persen sampai 6 persen," ujar Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Miyono, Rabu.

Pergerakan Ekonomi

Miyono mengatakan upaya pencegahan Covid-19 memang harus terus dilakukan. Saat ini penting untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat untuk hidup bersih, dan tetap konsisten menjaga protokol kesehatan. Tentu hal ini mesti diimbangi dengan percepatan vaksinasi.

Disisi lain, Miyono mengungkapkan untuk tetap menggerakkan roda perekonomian, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan. Selain mengoptimalkan pariwisata yang mulai bergerak saat ini, menurut Miyono, penyerapan anggaran pemerintah perlu dimaksimalkan. "Wisata digenot dua bulan ini dengan memperhatikan protokol kesehatan. Realisasi sisa anggaran yang ada di pemerintah, genot dioptimalkan sektor mana pun. Akan memicu, menjadi daya

ungkit sektor swasta untuk beraktivitas," ucap Miyono.

Miyono mencontohkan salah satu proyek yang dapat memicu pergerakan ekonomi yakni pembangunan jalan tol. Program tersebut dapat memberikan efek bergulir. Setidaknya akan mendorong konsumsi masyarakat meningkat di tengah rendahnya konsumsi saat ini.

Selain itu kegiatan belajar mengajar yang mulai bertahap dibuka, dengan proses yang ketat bisa memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. "SD sampai SMA sudah mulai kalau saya lihat, walaupun belum semua, itu bagus. Perguruan tinggi kalau bisa melakukan itu ya bagus. Kuncinya dari perguruan tinggi. Kita tahu mahasiswa [di DIY] datang dari berbagai penjuru Indonesia. Harus wajib vaksin, mungkin masuk kampus ada *Peduli Lindungi*, tidak boleh dulu kumpul-kumpul yang tidak jelas," ucapnya.

Urai Wisatawan

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie menilai kebijakan terkait dengan libur Nataru bakal mengurai wisatawan. "Efeknya teman-teman mesti ada sisi penurunan. Biasanya Nataru menjadi suatu

[*peak*] *season* yang ditunggu," ujar Bobby.

Bobby menyoroti dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, sebenarnya terpenting adalah konsistensi kebijakan. Pasalnya, industri wisata perlu kepastian kebijakan. Selain itu, monitoring dan evaluasi dari pergerakan wisatawan lah yang penting dilakukan. "Sebaiknya bagaimana benar-benar di Jogja punya *controlling* sistematis. Kegiatan kepariwisataan bisa digerakkan dengan aman. Aturan itu distandarkan. Harus punya hal yang sistematis menghadapi pandemi ke depan. Tidak bisa dinamis seperti ini," ujarnya.

Bobby juga selalu mengingatkan pada industri wisata agar patuh pada proses yang ditetapkan pemerintah. Jangan sampai ada yang lengah, dan justru merugikan industri pariwisata. Pariwisata bisa bergerak, aman terkendali.

Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY, Singgih Raharjo mengatakan kebijakan di akhir tahun merupakan upaya pemerintah mengurangi risiko terjadinya gelombang III Covid-19. Ia mengharapkan masyarakat wisatawan dan pengelola disiplin menerapkan proses. "Kuncinya itu saja. Kalau ada aturan *Peduli Lindungi QR Code* mari lakukan," ucap Singgih. (JIBI/Antara/Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pariwisata 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005